

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dikenal memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, terutama di sektor pertambangan. Beragam hasil tambang seperti batu bara, mineral, serta bahan galian C berupa pasir, batu, dan tanah menjadi salah satu sumber daya yang banyak dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Diberkahi sumber daya mineral yang melimpah, Indonesia memainkan peran kunci dalam perdagangan mineral hasil tambang global. Cadangan nikel dan timah Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, sementara potensi batubara, bauksit, dan tembaga juga menduduki peringkat atas secara global. Maka dari itu, pemerintah telah menempatkan hilirisasi sumber daya alam sebagai salah satu pilar utama dalam agenda nasional, yang bertujuan menopang pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan visi ambisius “Indonesia Emas 2045”, yaitu menjadi negara maju pada peringatan 100 tahun kemerdekaan (Al Amin dkk et al. 2024). Kegiatan dalam sektor pertambangan mencakup berbagai tahap mulai dari pengambilan sumber daya alam seperti mineral, batu bara, panas bumi, hingga minyak dan gas, kemudian dilanjutkan dengan proses pengolahan, pemanfaatan, sampai tahap pemasaran hasil tambang tersebut.

Idealnya, aktivitas pertambangan dapat mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat, terutama di wilayah sekitar lokasi tambang, melalui terciptanya lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur (Jasa et al., 2025). Namun di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian aktivitas pertambangan juga memunculkan berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan konflik sosial di masyarakat dan kerusakan ekosistem. Dalam banyak kasus, kehadiran perusahaan tambang justru menimbulkan ketegangan antar kelompok masyarakat, perebutan lahan, serta berdampak buruk terhadap lingkungan hidup seperti pencemaran air, udara, dan kerusakan lahan. Alih-alih meningkatkan kesejahteraan, jika tidak dikelola dengan bijak, kegiatan pertambangan dapat memicu ketimpangan sosial, memperparah kerusakan lingkungan, bahkan mengancam sumber penghidupan masyarakat lokal, khususnya yang sangat bergantung pada kondisi alam sekitarnya (Irwandi & Chotim, 2017).

Aktivitas penambangan, khususnya penambangan bahan galian C, seringkali menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. Di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, kegiatan pengambilan pasir di sepanjang Sungai Saddang telah menyebabkan abrasi dan pengikisan lahan milik warga. Hal ini bukan hanya mengancam lahan pertanian masyarakat, tetapi juga berdampak pada penurunan kesejahteraan ekonomi mereka akibat berkurangnya lahan produktif (Zulkifli, 2023).

Salah satu jenis proyek ekstraktif yang marak dan kerap menimbulkan polemik adalah pertambangan galian C yakni eksplorasi bahan galian seperti pasir, batu, dan kerikil. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (2023), terdapat lebih dari 5.800 izin usaha tambang galian C aktif di Indonesia, yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi (Badan Pusat Statistik, 2021). Di Provinsi Sulawesi Selatan sendiri, setidaknya 470 titik tambang galian C tercatat aktif hingga akhir 2023, dengan konsentrasi cukup tinggi berada di sekitar wilayah kelola masyarakat adat, termasuk di kawasan Tikala. Aktivitas tambang galian C di kawasan ini menjadi sumber ketegangan baru, karena tidak hanya berdampak pada perubahan bentang alam, tetapi juga mengancam nilai-nilai budaya, ruang hidup, dan kearifan lokal masyarakat setempat (Al Amin dkk et al. 2024).

Tidak jauh berbeda, di Kabupaten Gowa aktivitas tambang galian juga menimbulkan persoalan tersendiri. Lemahnya peran pemerintah dalam hal komunikasi dan pengawasan telah membuka celah terjadinya kerusakan jalan dan ekspansi tambang lahan lahan milik warga tanpa mekanisme pengendalian yang jelas (Madani et al, 2015). Situasi ini menimbulkan ketegangan antara masyarakat, pemerintah dan pihak pengelola tambang. Kondisi yang lebih kompleks terlihat di Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Kutai Kertanegara. Di daerah ini, maraknya penambangan batu bara ilegal menjadi sumber keresahan masyarakat karena tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga mengancam ruang hidup mereka. Masyarakat merasa terganggu oleh keberadaan tambang ilegal ini menunjukkan penolakan melalui berbagai bentuk perlawanan sosial (Ekonomi Pertanian dan Agribisnis et al., 2024).

Di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, wacana dan aksi menolak aktivitas pertambangan batu/kerikil (yang dalam praktik lokal sering disebut “tambang galian C”) telah bergulir selama beberapa tahun terakhir dan memuncak menjadi aksi massa, pengaduan ke lembaga hukum, serta sorotan DPRD dan media nasional. Berdasarkan laporan Liputan6.com (2025) Warga setempat melaporkan bahwa kegiatan penambangan beroperasi dekat atau di dalam kawasan yang memiliki nilai budaya, situs makam leluhur, dan fungsi ekologis penting seperti sumber mata air yang mengairi lahan pertanian luas. Kekhawatiran utama warga meliputi potensi kerusakan fisik situs-situs warisan, pengurangan kualitas dan kuantitas air, erosi dan longsor, serta terganggunya fungsi pariwisata budaya sebagai sumber penghidupan komunitas (Liputan 6). Kasus Tikala tidak berdiri sendiri sebagai persoalan lokal semata ia menyingkap persinggungan tiga aspek yaitu legitimasi hukum negara (perizinan dan tata ruang yang diatur oleh peraturan nasional dan daerah), hak hidup dan ketentraman masyarakat yang bergantung pada sumber daya lokal, dan otoritas adat serta nilai-nilai kultural yang menjadikan alam sebagai ruang sakral dan sejarah kolektif. Ketika tuntutan ekonomi (penyediaan bahan konstruksi, pendapatan daerah) berhadapan dengan klaim perlindungan warisan budaya dan lingkungan, perpaduan argumentasi hukum-formal dan legitimasi moral-kultural menjadi arena utama pertarungan. Di Tikala, mekanisme penolakan melihat bahwa ketika tokoh adat turun tangan, tuntutan warga memperoleh dimensi simbolik yang kuat sekaligus memperlebar daya tawar dalam pertemuan dengan pemerintah dan institusi penegak hukum.(Susyanti et al., 2022)

Secara institusional, kasus ini juga menarik perhatian aparat penegak hukum: ada laporan penyelidikan dugaan kesalahan administrasi atau korupsi terkait pemberian izin penambangan di wilayah itu, yang kemudian diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Perhatian DPRD provinsi dan desakan warga untuk penegakan hukum menegaskan bahwa konflik lokal ini telah melesat menjadi persoalan tata kelola publik yang memerlukan kajian administratif dan hukum yang serius. Pernyataan akademisi dan tim kuasa hukum warga yang muncul di media menekankan kebutuhan audit izin, kepatuhan terhadap rencana tata ruang wilayah (RT/RW), dan perlindungan kawasan cagar budaya. Bagi masyarakat Toraja, hubungan dengan leluhur, ruang makam (tongkonan dan batu kubur), serta praktik ritual seperti Rambu Solo' membentuk jejaring makna yang mengikat komunitas. Warisan materiil batu, situs karst sering dipahami bukan sekadar sumber daya alam, melainkan bagian dari tata kosmologis dan narasi asal-usul komunitas. Oleh karenanya, ancaman fisik terhadap makam atau struktur ruang ritual sering ditanggapi sebagai pelanggaran terhadap keteraturan moral-kultural dan hubungan generasional. Literatur etnografi tentang Toraja menegaskan bahwa tuturan ritual (kada tominaa) dan posisi tokoh ritual memegang peran penting dalam merawat makna sosial tersebut.

Aktivitas pertambangan yang ada di Tikala, Toraja Utara yang dimana dikelola oleh sebuah perusahaan bernama Cv. Bangsa Damai. Luas area tabang awalnya disebut mencapai sekitar 24,9 hektare namun dalam perkembangannya kemudian direkomendasikan untuk dikurangi menjadi 19 hingga 22 hektare karena sebagian wilayahnya berdekatan dengan situs budaya, sumber mata air masyarakat setempat serta tongkonan atau rumah adat yang termasuk dalam lokasi eksplorasi sebelum direkomendasikan. Kedekatan lokasi tambang dengan situs adat dan sumber air inilah yang memicu penolakan dan juga resistensi di masyarakat setempat.

Masyarakat adat Tikala merupakan salah satu komunitas adat yang selama ini hidup dengan kearifan lokal yang terikat erat pada lingkungan alam. Dalam sistem pengetahuan mereka, tanah, hutan, dan air bukan sekadar sumber daya ekonomi, melainkan bagian dari sistem kosmologi yang mengatur harmoni antara manusia, leluhur, dan alam. Ketika ruang hidup ini mulai dirusak oleh proyek-proyek ekstraktif seperti tambang, masyarakat tidak hanya menghadapi persoalan ekologis, tetapi juga persoalan identitas, spiritualitas, dan keberlanjutan sosial budaya. Reaksi masyarakat pun beragam, mulai dari penolakan simbolik, demonstrasi terbuka, hingga penggunaan mekanisme adat untuk menghalangi jalannya proyek. Dalam konteks ini, tokoh adat memainkan peran penting sebagai pemimpin moral dan sosial yang tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga memimpin perlawanan kolektif terhadap proyek yang dinilai merusak tatanan. (Baan et al., 2022)

Realitas tersebut memperlihatkan bahwa konflik dalam proyek tambang tidak hanya merupakan pertarungan antara masyarakat dan perusahaan, tetapi juga menyimpan dinamika internal yang kompleks (Putri et al., 2023). Dalam banyak kasus, terjadi perbedaan sikap di dalam komunitas itu sendiri antara mereka yang menolak dengan yang menerima proyek. Konflik vertikal ini seringkali luput dari perhatian, padahal ia

mencerminkan ketegangan antara nilai kolektif dan kepentingan individual, antara adat dan modernitas, antara otoritas lokal dan tekanan eksternal (Al Amin dkk al. 2024).

Analisis kasus Tikala menampilkan keterlibatan berlapis tokoh adat yang memengaruhi dinamika resistensi. Tominaa (ahli tutur/pujangga ritual) dimana penguasaan terhadap kada tominaa (tutur-upacara) membuat Tominaa memiliki kapasitas untuk mengecam pelanggaran terhadap situs sebagai tindakan yang “mengganggu leluhur”. Tomatua/Tetua Adat (pemimpin klan/keluarga) memegang wewenang keputusan komunitas terkait penggunaan tanah adat, mediasi konflik, dan pengesahan keputusan kolektif. Tokoh keagamaan dimana di Toraja, adanya praktik adat dan agama menghadirkan tokoh-tokoh yang menggabungkan legitimasi agama dan adat. Aktivis lokal, pemuda adat, dan kuasa hukum komunitas walaupun bukan tokoh adat tradisional, kelompok-kelompok ini berperan penting dalam strategi litigasi, kampanye media, dan pengorganisasian demonstrasi

Berdasarkan hasil observasi awal dengan direktur Perusahaan di Tikala dan beberapa masyarakat bahwa dengan adanya tambang muncul adanya kecemburuan sosial antara para penambang yang ada di lingkup Toraja, muncul berita-berita yang tidak mengenakan dan terjadi pembodohan di masyarakat yang mengakibatkan masyarakat mudah termakan hoax dan itu juga mempengaruhi aktivitas tambang. Dari pengamatan kasus Tikala, mobilisasi warga menggunakan kombinasi strategi: aksi jalan dan demonstrasi, pelaporan ke polisi/kejaksaan, pengajuan klaim ke DPRD dan aparat provinsi, publikasi media (liputan berita dan sosial media), hingga upaya litigasi administratif. Tokoh adat memainkan peran sentral dalam menyatukan narasi adat dan tuntutan hukum misalnya, tomatua mengeluarkan ketetapan komunitas sementara tominaa memberikan rumusan moral-sakral yang membingkai pertambangan sebagai pelanggaran nilai. Kolaborasi dengan kuasa hukum membantu menerjemahkan tuntutan adat ke dalam bentuk tuntutan hukum administrasi/lingkungan yang dapat diuji di ranah negara.

Jenis tambang yang beroperasi di Tikala termasuk kedalam kategori galian C batuan, yakni tambang yang menghasilkan material seperti batu kali, gunung dan tanah urug yang biasanya digunakan untuk keperluan infrastruktur pembangunan. Meskipun secara hukum kegiatan ini mendapatkan izin usaha tambang (IUP) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat dengan kehadiran tambang selain dari mengancam situs budaya adalah jalan yang dilalui dalam proses keluar masuknya angkutan untuk mengangkut hasil tambang sebagian rusak dikarenakan kelebihan muatan dan jalan yang dilalui tersebut juga sudah mulai retak yang mengakibatkan resapan air masuk di jalan dan mengakibatkan jalan mulai terkikis dan juga sempit dikarekan hal tersebut.

Dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana masyarakat adat Tikala memaknai, merespon, serta melawan proyek tambang galian C yang masuk ke wilayah adat mereka. Penelitian ini akan secara khusus menyoroti peran tokoh adat sebagai aktor sentral dalam gerakan resistensi, serta

bagaimana mereka mengelola konflik internal di tengah tekanan eksternal. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali bagaimana informasi, keterlibatan warga, dan strategi khususnya Tokoh Adat sebagai posisi yang sentral dalam masyarakat dan terbentuk dalam konteks budaya dan struktur sosial yang ada di masyarakat Tikala.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah (kualitatif) karena kompleksitas masalah yang dikaji membutuhkan integrasi antara data kualitatif secara mendalam. Data kualitatif dibutuhkan untuk menggali makna, dan strategi peran yang digunakan oleh tokoh adat dalam menyikapi situasi serta bentuk resistensi yang dilakukan oleh tokoh adat dan juga masyarakat lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menangkap gejala di permukaan, tetapi juga memahami struktur kuasa dan relasi pertarungan aktor sosial yang mendasarinya.

Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur tentang resistensi masyarakat adat di Indonesia dengan menyoroti peran tokoh adat sebagai agen perubahan, bukan sekadar penjaga tradisi. Sementara secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perumus kebijakan pembangunan agar lebih sensitif terhadap konteks lokal, serta membuka ruang partisipasi yang lebih inklusif dan adil. Di tengah gempuran proyek ekstraktif yang terus mengancam keberlanjutan sosial ekologis, studi seperti ini penting untuk memastikan bahwa pembangunan tidak dilakukan dengan mengorbankan yang paling lemah, yakni komunitas adat yang selama ini menjaga harmoni antara manusia dan alam.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Bagaimana Bentuk Resistensi Masyarakat Lokal Tambang Terhadap proyek Tambang Galian C?
2. Bagaimana Peran Tokoh Adat dalam Resistensi Masyarakat Terhadap Tambang Galian C?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bentuk Resistensi Masyarakat Lokal Tambang Terhadap Proyek Tambang Galian C
2. Mengidentifikasi Peran Tokoh Adat dalam Resistensi Tambang Galian C

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dalam penelitian ini dibagi menjadi dua:

a. Bagi Peneliti

Peneliti bisa lebih memahami topik yang diteliti dan mengasah kemampuan, berpikir kritis serta metode penelitian. Selain itu peneliti dapat menemukan solusi nyata untuk masalah yang mereka hadapi di bidang tertentu.

b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pembaca untuk menambah pengetahuan tentang topik terkait serta dapat mendorong adanya riset lanjutan bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau menggali topik tersebut lebih dalam.

3. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian sosiologi politik lingkungan.
- b. penelitian ini diharapkan dapat menjadi pijakan serta referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas peran tokoh adat dalam perebutan wilayah adat maupun isu-isu lain yang berkaitan dengan fenomena lingkungan dan adat serta politik

1.5 Deskripsi Konsep, Teori, dan Penelitian Terdahulu

1.5.1 Konsep Masyarakat Adat

Masyarakat adat adalah kelompok sosial yang hidup secara turun-temurun di suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan historis dan spiritual dengan tanah leluhur, serta, menjalankan sistem nilai, hukum, dan kelembagaan adat secara mandiri. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), masyarakat adat memiliki karakteristik khusus, yaitu penguasaan wilayah adat, keberadaan sistem nilai dan norma adat, serta pengakuan atas identitas kolektif sebagai komunitas adat. (Alyanada & Iskandar, 2023)

Dalam konteks masyarakat adat Tikala di Toraja Utara, tanah bukan sekedar ruang ekonomi, melainkan bagian dari warisan leluhur, simbol identitas, dan ruang spiritual. Perampasan atau eksploitasi tanah adat tanpa persetujuan menjadi bentuk ancaman terhadap eksistensi kolektif masyarakat adat, sehingga memicu resistensi yang berbasis pada nilai-nilai lokal.

1.5.2 Konsep Proyek Ekstraktif

Proyek ekstraktif merujuk pada kegiatan industri yang mengambil sumber daya alam secara besar-besaran untuk kepentingan pasar, seperti pertambangan, perkebunan skala besar, dan eksploitasi hutan. Kegiatan ini sering diklaim sebagai bagian dari pembangunan nasional, namun pada akhirnya membawa dampak ekologis dan sosial yang besar terhadap masyarakat lokal (Zon, 2019).

Dalam banyak kasus di Indonesia, proyek-proyek tambang beroperasi di atas tanah adat tanpa proses persetujuan bebas dan tidak diinformasikan terlebih dahulu, serta sering mengakibatkan konflik horizontal, kerusakan lingkungan, dan hilangnya akses masyarakat terhadap ruang hidupnya. Selain itu proyek ekstraktif dalam hal ini tambang galian C yang tidak sesuai dengan ketentuan atau bahkan aturan yang ada menimbulkan banyak masalah lingkungan mulai dari deforestasi serta dampak lingkungan bagi masyarakat lokal tambang dan mengancam berbagai kelangsungan hidup flora dan fauna masyarakat secara luas (Safa'at et al).

1.5.3 Konsep Tokoh Adat

Tokoh adat merupakan figur sentral dalam struktur sosial masyarakat adat. Mereka memiliki otoritas moral, kultural, dan spiritual yang diakui secara kolektif. Dalam tradisi masyarakat adat Toraja, tokoh adat (to minaa, kapua atau ketua tongkonan) berperan sebagai penjaga adat, pemimpin upacara ritus, dan penghubung antara leluhur dan masyarakat saat ini.

Menurut Hontong dkk dalam (Hontong et al., n.d.) bahwa Dalam konteks konflik terhadap proyek ekstraktif dalam hal ini tambang galian C, tokoh adat bukan hanya simbol tradisi, melainkan juga pemimpin politik kultural yang mampu mengonsolidasikan solidaritas komunitas. Mereka memainkan peran strategis dalam resistensi, baik melalui aksi simbolik seperti ritual adat, pelarangan tanah atau bahkan yang lainnya serta tindakan kolektif seperti musyawarah adat.

1.5.3 Konsep Resistensi

Resistensi merupakan konsep penting dalam memahami dinamika sosial masyarakat yang menghadapi tekanan, dominasi, atau intervensi dari kekuatan eksternal. Secara etimologis, resistensi berasal dari kata *resistance* yang berarti perlawanan atau penolakan terhadap suatu kekuasaan. Dalam konteks sosial, resistensi tidak selalu diartikan sebagai tindakan kekerasan atau pemberontakan, melainkan juga dapat berbentuk strategi bertahan, penolakan simbolik, atau ekspresi kultural yang dilakukan masyarakat dalam merespons ancaman terhadap kehidupan dan nilai-nilai mereka. (Wawan et al., 2021)

Dalam konteks masyarakat adat, resistensi seringkali berkaitan dengan usaha mempertahankan hak, kelestarian lingkungan, serta nilai-nilai budaya dan spiritual yang dianggap suci. Ketika sumber daya alam seperti tanah, air, dan hutan yang memiliki makna simbolik dan spiritual bagi masyarakat adat yang diintervensi oleh pihak luar misalnya oleh proyek tambang galian C maka tindakan resistensi menjadi bentuk perlawanan moral dan kultural terhadap dominasi eksternal tersebut. Resistensi masyarakat adat bukan semata-mata tindakan politik, tetapi juga merupakan ekspresi kultural dan spiritual untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.

Menurut Bryant dan Bailey (1997) dalam (Murtasidin & Sigalingging, 2020) resistensi adalah bentuk perlawanan yang muncul akibat ketimpangan kekuasaan dan distribusi manfaat lingkungan yang tidak merata. Dalam konteks masyarakat adat atau masyarakat lokal, bahwa kelompok masyarakat bawah mengalami kerugian akibat dari kebijakan pembangunan, proyek eksploitasi sumber daya alam, atau dominasi politik ekonomi dari aktor kuat seperti negara, perusahaan, dan muncullah masyarakat marjinal untuk melakukan resistensi untuk mempertahankan ruang hidup, hak atas sumber daya, identitas serta keadilan lingkungan yang seharusnya mereka dapatkan.

Maka dari itu, tokoh adat berperan penting dalam membangun dan memimpin resistensi ini, karena mereka memiliki akses dan legitimasi secara budaya dan nilai-nilai serta posisi sentral dalam masyarakat. Dengan demikian, resistensi bukan hanya aksi politik melainkan juga ekonomi, kultural serta berakar pada struktur sosial dan spiritual masyarakat adat.

1.5.4 Teori Politik Ekologi Dunia Ketiga (Third World Political Ecology)

Pendekatan teori politik ekologi untuk memahami perubahan lingkungan negara dunia ketiga yang dimana dalam teori ini menekankan bahwa isu lingkungan tidak bisa hanya dilihat sebagai isu utama melainkan selalu terhubung dengan politik, ekonomi, dan kekuasaan. Artinya bahwa isu-isu lingkungan selalu dipengaruhi oleh berbagai aktor, kepentingan politik, dan juga kekuasaan. Dimana ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan atau yang dirasakan akan memicu konflik antar aktor tersebut antara lain negara, pengusaha, dan masyarakat.

Ada beberapa asumsi penting dari teori ini yaitu distribusi biaya dan manfaat lingkungan tidak merata artinya bahwa ketika terjadi sebuah kerusakan atau perubahan lingkungan di masyarakat, beberapa aktor mendapat manfaat sedangkan aktor yang lainnya menanggung biaya lebih besar dibandingkan yang lain atas kerugian yang didapatkan. Juga terjadi perbedaan atau ketidaksetaraan sosial ekonomi dimana bahwa siapa yang memiliki legitimasi hukum dan akses terhadap sumber daya maka sumber daya hanya bisa dimiliki oleh orang-orang tertentu saja dan meraut keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Menurut Bryant dan Bailey bahwa resistensi dipahami sebagai bentuk perlawanan yang muncul akibat ketimpangan kekuasaan dan distribusi manfaat yang tidak merata di masyarakat atau bahkan tumpang tindih.

Resistensi yang muncul dapat dilihat sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat lokal. Perusahaan dan pemerintah memiliki kekuasaan struktural untuk menentukan arah kebijakan dan penggunaan lahan secara hukum, serta secara adat. Sedangkan masyarakat sendiri sering kali diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki suara dalam hal tersebut. Resistensi juga memiliki dimensi kekuasaan, dimana relasi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah merupakan arena perebutan sumber daya alam menjadi objek utama. (Satria, n.d.)

1.6 Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi dasar untuk menemukan perbandingan, sehingga dapat memperkaya teori serta relevansi dari yang digunakan saat melakukan penelitian. Peneliti mengambil beberapa sumber referensi dari google scholar dan science direct agar referensi bisa dijadikan landasan penelitian terdahulu. Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Persoalan Tambang yang dinilai memiliki keterkaitan dengan penelitian yang ingin dilakukan dan berdasarkan hasil penelusuran dari 25 jurnal diambil 5 jurnal yang juga membahas persoalan mengenai tambang sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulkifli (2023)	Dampak Bagi Hasil Tambang Galian C	Kuantitatif Deskriptif	Kegiatan penambangan galian C berupa pasir di Sungai Saddang, Kabupaten

		Terhadap Pendapatan Ekonomi Masyarakat Dua Desa di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang		Pinrang, Sulawesi Selatan, memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Dari sisi ekonomi, aktivitas penambangan tersebut mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang terlibat secara langsung, baik sebagai pekerja maupun pihak yang lahannya dimanfaatkan untuk penambangan. Namun, dampak positif tersebut tidak terlepas dari konsekuensi negatif, terutama terkait kerusakan lingkungan dan penurunan kualitas lahan pertanian akibat abrasi sungai dan aktivitas kendaraan pengangkut hasil tambang. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara manfaat ekonomi dan kerugian ekologis yang dirasakan masyarakat sekitar tambang.
2	Herman, Madani, & Tahir (2015)	Komunikasi Pemerintah dalam Pengelolaan Tambang di Kabupaten Gowa	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menemukan bahwa komunikasi pemerintah, baik dalam bentuk komunikasi informatif maupun persuasif, masih tergolong sangat lemah. Kurangnya penyampaian informasi kepada masyarakat serta minimnya upaya membangun kesadaran publik terkait pengelolaan tambang menjadi salah satu penyebab munculnya konflik sosial dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sumber daya

				alam. Faktor-faktor penghambat lain yang ditemukan adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, ketidaktegasan aparat dalam penegakan aturan, serta rendahnya kepedulian pemilik tambang terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas mereka.
3	Mambi, Pangkorego, & Sarapun (2023)	Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Toraja Utara	Yuridis Empiris	menunjukkan dampak serius dari aktivitas tambang galian C ilegal terhadap kerusakan lingkungan di Kabupaten Toraja Utara. Aktivitas tambang tanpa izin ini menyebabkan degradasi lahan, longsor, pencemaran udara dan air, hingga kerusakan fasilitas wisata yang menjadi andalan daerah tersebut. Sayangnya, penegakan hukum terhadap pelaku tambang ilegal masih sangat lemah. Baik sanksi administratif, pidana, maupun perdata yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum dijalankan secara optimal. Fakta ini menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan dan ketegasan aparat penegak hukum terhadap pelanggaran di sektor pertambangan.
4.	Irwandi & Chotim (2017)	Analisis Konflik Antara Masyarakat,	Kualitatif Deskriptif	Penelitian ini menemukan bahwa konflik antara masyarakat, pemerintah

		Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Belitung)		desa, dan perusahaan tambang pasir di Dusun Sungai Samak terjadi akibat beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor utamanya adalah tidak adanya sosialisasi yang maksimal dari pemerintah desa terkait rencana dan dampak aktivitas pertambangan. Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, bahkan tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai wilayah eksploitasi, mekanisme pertambangan, potensi dampak lingkungan, serta manfaat apa yang bisa mereka dapatkan dari keberadaan perusahaan tambang tersebut.
5.	Dziqie (2024)	Resistensi Masyarakat Terhadap Aktifitas Penambangan Ilegal di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara	Kualitatif Deskriptif dengan Konsep Framing	mengkaji perlawanan masyarakat terhadap kegiatan penambangan batu bara ilegal. Menggunakan konsep <i>framing</i> , penelitian ini menjelaskan bagaimana masyarakat membangun narasi penolakan terhadap aktivitas tambang ilegal yang dianggap merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup mereka. Masyarakat memandang kegiatan tambang ilegal sebagai bentuk kejahatan terorganisir yang tidak hanya merusak alam tetapi juga memicu ketidakadilan sosial dan ketegangan antar warga. Bentuk resistensi yang muncul tidak hanya berupa protes lisan, tetapi juga aksi kolektif dan pengorganisasian masyarakat untuk menolak

				masuknya tambang ilegal ke wilayah mereka. Penelitian ini juga menegaskan pentingnya keberpihakan pemerintah dan penegakan hukum dalam merespons aspirasi masyarakat yang menolak eksploitasi sumber daya alam secara ilegal dan merusak..
--	--	--	--	--

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Dari hasil penelusuran bahwa penelitian mengenai pertambangan dan dampaknya terhadap masyarakat lokal sudah banyak dilakukan, baik menyoroti aspek ekonomi dalam hal ini tingkat kesejahteraan masyarakat atau bahkan dampak yang dihasilkan dari penelitian itu, lingkungan bahkan sosial secara umum. Beberapa studi terdahulu di atas menekankan pada beberapa aspek seperti kerusakan lingkungan, perlawanan masyarakat, konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, dampak tambang yang ilegal, serta kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Namun dari berbagai penelitian tersebut, masih terdapat gap yang belum banyak di isi, yaitu kajian yang menempatkan Tokoh Adat sebagai aktor sentral dalam dinamika resistensi masyarakat. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada konflik atau kebijakan negara tetapi kurang mengeksplorasi peran sosial dan kultural yang dimiliki oleh tokoh adat itu sendiri dalam mengorganisir perlawanan masyarakat. Padahal dalam konteks masyarakat adat, tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai pemimpin moral, mediator konflik, dan simbol resistensi dalam masyarakat. Dengan demikian gap penelitian ini terletak pada minimnya kajian yang menyoroti tokoh adat yang memegang posisi sentral dalam masyarakat adat dijadikan sebagai motor penggerak dalam resistensi terhadap tambang, serta mayoritas tambang terutama tambang galian c di Indonesia hanya menekankan pada aspek ekonomi, dan legal atau tidaknya.

Penelitian ini juga menawarkan kebaruan (novelty) dengan menghadirkan perspektif teori politik ekologi dunia ketiga yang menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam selalu bukan hanya sebatas persoalan ekologis akan tetapi ada juga politik dimana kekuasaan, kepentingan ekonomi berada dalam arena yang satu, maka dari itu kebaruan dari penelitian ini yaitu memberikan gambaran mengenai dinamika kekuasaan, perlawanan, dan konflik kepentingan dalam masyarakat yang belum banyak dikaji secara akademik. Selain itu dengan menggunakan teori ekologi dunia ketiga untuk melihat bagaimana tokoh adat yang memiliki kepentingan dan juga kekuasaan melakukan penolakan atas ancaman terhadap sumber daya alam. Mengungkap alasan dibalik resistensi yang dilakukan oleh masyarakat.

1.7 Kerangka Pikir

Masuknya proyek tambang galian C di Kelurahan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, menghadirkan persoalan yang kompleks bagi masyarakat setempat. Penelitian ini berangkat dari permasalahan utama yang muncul akibat hadirnya tambang galian C di Kelurahan Tikala, Kabupaten Toraja Utara. Kehadiran Tambang ini tidak hanya dipahami sebagai pemicu dinamika sosial yang melibatkan kepentingan masyarakat adat dengan tokoh adat di satu sisi, serta perusahaan sebagai pemilik modal di sisi lain. Dalam konteks inilah resistensi masyarakat muncul sebagai sebuah gerakan kolektif, yang kemudian dipimpin dan diarahkan oleh tokoh adat sebagai figur sentral yang memiliki peran dalam budaya, sosial, sekaligus politik dalam komunitasnya.

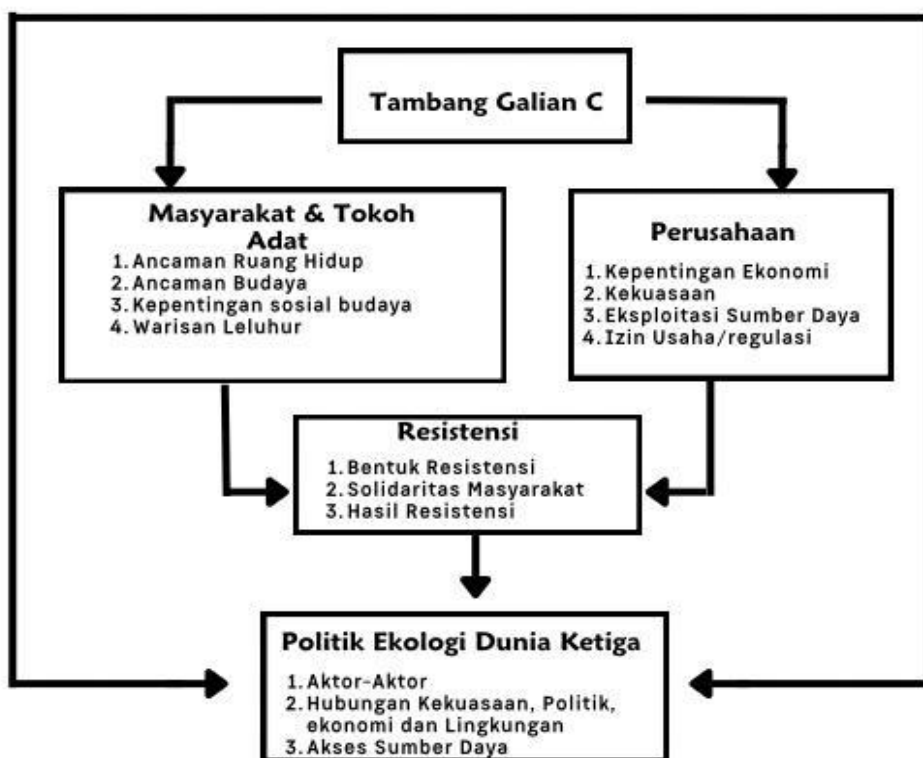
Di tengah situasi yang penuh dengan ancaman ini tokoh adat muncul sebagai pemimpin yang memegang peran yang sangat penting. Tokoh adat tidak hanya sebagai orang yang paham akan budaya, dan pemegang kekuasaan adat dalam masyarakat serta warisan leluhur tetapi juga berfungsi sebagai penggerak resistensi masyarakat. Melalui wibawa sosial dan otoritas yang dimiliki, tokoh adat mampu menyatuhkan warga dalam sebuah sikap kolektif menolak keberadaan tambang. Kehadiran tokoh adat memberi arah resistensi sekaligus menghubungkan masyarakat adat dengan berbagai pihak luar termasuk pemerintah maupun organisasi yang mendukung perjuangan mereka. Tokoh adat inilah yang memastikan bahwa resistensi masyarakat Tikala tidak hanya muncul secara spontan, tetapi terorganisir dengan rapi dan memiliki dasar budaya yang kuat.

Di sisi lain perusahaan yang berusaha membuka tambang galian C yang biasanya di pandang bahwa wilayah tersebut memiliki peluang ekonomi yang menguntungkan. Bagi perusahaan, material tambang seperti batu, pasir, dan kerikil merupakan komoditas penting yang bernilai jual tinggi di pasar konstruksi. Kepentingan ekonomi inilah yang mendorong mereka untuk mengeksploitasi sumber daya alam di Tikala. Perusahaan biasanya memiliki modal yang besar, jaringan politik, serta akses terhadap regulasi formal yang memungkinkan mereka mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Inilah yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk melanjutkan aktivitasnya, meskipun di lapangan terdapat penolakan kuat dari masyarakat adat. Di titik ini terlihat adanya benturan antara izin hukum yang dimiliki perusahaan dan izin sosial budaya yang dipegang oleh masyarakat adat sendiri. Resistensi yang dipimpin oleh tokoh adat memiliki dampak yang kompleks. Dari sisi positif, resistensi mampu memperkuat solidaritas sosial antara masyarakat, menumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, serta mengukuhkan posisi tokoh adat sebagai pelindung dan pemimpin moral dalam suatu komunitas adat masyarakat.

Benturan kepentingan antara masyarakat adat dengan perusahaan melahirkan resistensi yang semakin menguat. Resistensi ini tidak hanya dimaknai sebagai bentuk penolakan terhadap aktivitas tambang tetapi juga sebagai bentuk perlawanan terhadap ancaman identitas, budaya, dan ruang hidup masyarakat. Resistensi masyarakat adat Tikala kemudian diwujudkan dalam berbagai bentuk baik berupa penolakan terbuka, aksi protes, penyampaian aspirasi melalui forum-forum resmi, hingga menghidupkan kembali narasi tentang pentingnya melindungi tanah adat dari eksploitasi. Melalui resistensi ini, tokoh adat berperan sebagai penggerak sekaligus menjamin solidaritas masyarakat, sehingga setiap warga dapat merasa terikat pada perjuangan kolektif tersebut.

Dalam arena pertarungan yang terjadi dimana aktor-aktor dalam hal ini negara, perusahaan, masyarakat lokal, tokoh adat serta yang lainnya saling berinteraksi dan berkompetisi serta bernegosiasi dalam menguasai, mengakses, dan memanfaatkan sumber daya alam demi kepentingan ekonomi. Pertarungan yang kemudian terjadi menjadi inti dari politik sumber daya dimana ketika para aktor ini memainkan peran masing-masing maka di situlah solidaritas baik perusahaan, masyarakat dan tokoh adat dalam menghadapi berbagai ancaman dan memainkan strategi yang dimilikinya.

Dalam kerangka teori Bryant dan Bailey, resistensi masyarakat Tikala dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika politik lingkungan dunia ketiga yang dimana ketimpangan antara kekuatan global dan lokal menciptakan konflik atas sumber daya alam. Tokoh adat seharusnya hadir sebagai agen perubahan yang berusaha menjaga antara manusia dan juga alam sekaligus memiliki peran untuk bernegosiasi demi ekhlangsungan hidup nantinya. Resistensi bukan hanya reaksi spontan terhadap ancaman ekonomi, tetapi juga bentuk dari kesadaran dengan adanya ketidakadilan yang terjadi antara penguasa dan juga masyarakat.



Gambar 1. Kerangka Konsep

BAB II

METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan, Strategi dan Tipe Penelitian

Metode yang digunakan Peneliti dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Dalam buku penelitian kualitatif (Abdussamad, 2021), Penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, gambar, bagan dan foto. Dalam penelitian kualitatif, permasalahan yang dibawa oleh peneliti masih bersifat sementara dan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Penelitian ini menggunakan strategi penelitian studi kasus dikarenakan dengan pendekatan ini dapat melihat fenomena yang terjadi hanya di satu daerah saja dalam hal ini proyek tambang galian C di Tikala Toraja Utara dengan pendekatan kualitatif deskriptif diharapkan data yang akan di dapatkan nantinya bisa di uraikan dan di jelaskan secara rinci dan mendalam guna untuk mendapatkan hasil dan jawaban dari rumusan masalah yang ada. Selain itu Penelitian ini juga akan menggunakan Wawancara semi Terstruktur dengan melihat bagaimana persepsi masyarakat Lokal dalam hal ini masyarakat lokal tambang yang ada di Tikala dengan adanya tambang juga dengan wawancara semi terstruktur juga dapat melihat apakah dengan kehadiran tambang yang ada di Tikala masyarakat menolak atau bahkan sebaliknya masyarakat menerima dengan adanya tambang dalam hal ini penerimaan kehadiran tambang yang ada di wilayah adat.

2.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

2.2.1 Waktu penelitian

No	Nama Kegiatan	Tahun 2025							
		Agst	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Penyusunan Proposal Penelitian								
2	Bimbingan Proposal Penelitian								
3	Seminar Proposal Penelitian								
4	Pengurusan Surat Izin Penelitian								
5	Pengumpulan Informasi dan Wawancara Mendalam								

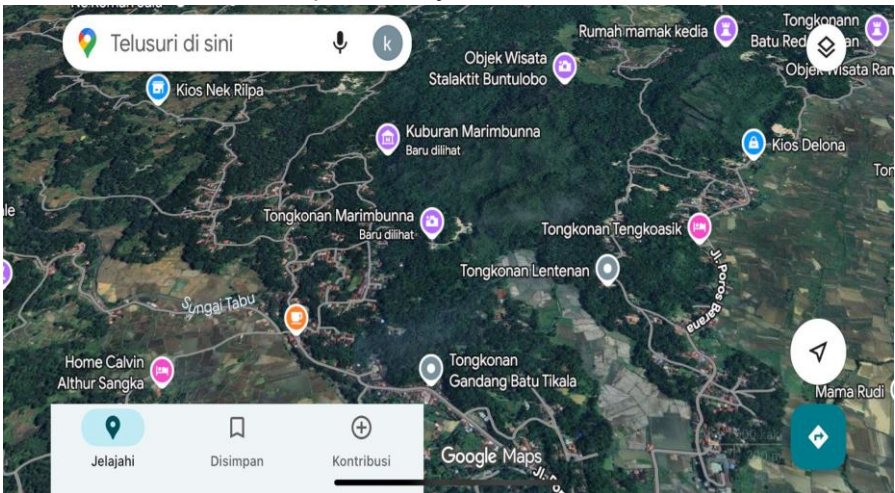
6	Transkripsi dan Pengecekan Data								
7	Proses Analisis Data								
8	Pembuatan Laporan Hasil Penelitian								
9	Bimbingan Laporan Hasil Penelitian								
10	Seminar Hasil Penelitian								

Tabel 2. Waktu Penelitian

Periode penelitian mencakup seluruh siklus kegiatan akademik, dimulai dari fase persiapan (penyusunan proposal dan instrumen), pelaksanaan (pengumpulan data), analisis (pengolahan data), hingga penyusunan laporan akhir. Secara lebih rinci, tahapan-tahapan penelitian beserta temuan yang diperoleh akan dipaparkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

2.2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan jadwal rutin selama 2 (dua) Minggu dalam satu bulan, yang diselenggarakan di lokasi penelitian utama yaitu Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.



Diakses
tanggal
24

September 2025
Sumber: Gmaps

Gambar 2. Lokaasi Penelitian

2.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penentuan informan merupakan hal yang paling pentng karena data yang diperoleh bergantung pada kualitas, kedalaman, serta relevansi informasi yang diberikan oleh para informan (Waruwu, 2024).

Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu teknik *non probability sampling* dengan menggunakan *purposive sampling* yakni pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti. Adapun beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Tokoh adat Yang ada di Kelurahan Tikala, Kecamatan Tikala, Toraja Utara
2. Masyarakat yang tinggal sekitar Tambang atau yang merasakan dampak dari adanya Tambang Galian C
3. Direktur tambang Galian C
4. Pemerintah dalam hal izin

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh beberapa langkah yaitu:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah metode penghimpunan data yang ada di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendapatkan kondisi dari sebuah fenomena atau kejadian pada masalah yang akan diteliti. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti yang terjadi dalam kenyataan, serta untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai suatu fenomena yang diteliti, yang sukar diperoleh dengan metode lain. (UIN suska Riau, n.d.)

2. Wawancara Mendalam dan wawancara Semi Terstruktur

Mendefinisikan wawancara mendalam atau *depth interview* adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Selain itu untuk memperkuat data yang akan di olah nantinya peneliti juga melakukan wawancara semi terstruktur untuk melihat aktor dalam hal ini masyarakat baik dari segi ekonomi sosial dan juga dampak yang kemudian dihasilkan dari adanya tambang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah laporan yang dilakukan bisa secara tertulis dengan gambar yang berisikan dari penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan penelitian. Teknik pengumpulan data dokumentasi juga merupakan bentuk dari pemberian ataupun pengumpulan bukti-bukti dan keterangan (seperti kutipan dari surat kabar dan gambar-gambar) .

2.5 Teknik Analisis Data

Analisa data penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dihasilkan dari metode dokumentasi dan wawancara dikumpulkan untuk kemudian diolah dan dideskripsikan dengan bentuk uraian pendapat, karena analisis data berkaitan erat dengan teknik pengumpulan data. Proses analisa data dalam penelitian kualitatif menurut Haryoko dkk dalam (Haryoko et al., 2020), analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip interview, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain yang didapatkan, yang semuanya akan

dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman (terhadap suatu fenomena) dan membantu untuk mempresentasikan penemuan ke orang lain.

2.6 Pengujian keabsahan data

Susanto (2023) menyebutkan bahwa pengumpulan data adalah suatu usaha sistematis dengan prosedur terstandar untuk memperoleh ukuran variabel dan jawaban atas pertanyaan penelitian. Keabsahan data merupakan standar kebenaram suatu data hasil penelitian yang lebih menekankan pada data/informan dari pada sikap dan jumlah orang. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif memiliki istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Menurut Susanto dalam (Susanto et al., n.d.2023),ada beberapa cara untuk pengujian keabsahan data. Dalam penelitian ini uji data yang digunakan adalah *credibility* (validitas internal)

2.7 Uji Kredibilitas

Pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, menggunakan bahan referensi, Member check.(Husnullail et al., 2024)

- a. Perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, dan melakukan wawancara dengan sumber data, baik yang pernah ditemui maupun yang baru ditemui. Lamanya perpanjangan pengamatan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan, dan kepastian data. Peningkatan ketekunan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.
- b. Dengan cara tersebut, kepastian data dan urutan peristiwa dapat direkam secara pasti dan sistematis.
- c. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan bermacam cara dan beragam waktu. Dengan demikian, triangulasi terdiri atas:
 - 1) Triangulasi sumber: dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan, dan akhirnya diminta kesepakatan (*member check*) untuk mendapatkan kesimpulan.
 - 2) Triangulasi teknik. Dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
 - 3) Triangulasi waktu. Berkaitan dengan keefektifan waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari saat narasumber masih segar dan belum banyak menghadapi masalah akan memberikan data yang lebih valid, sehingga hasil penelitian lebih kredibel.

- d. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bahan referensi ini dapat berupa foto- foto, rekaman, dan dokumen otentik.
- e. Member check adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data. Member check bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan member check dapat dilakukan setelah satu periodel pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan.